

Pagoejoeban Pasoendan 1913-1942

Aldi Cahya Maulidan¹, Agus Mulyana²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia

Email: aldicaHYa58@gmail.com

Abstract

The study was entitled "PAGOEJOEBAN PASOENDAN 1913-1942". The author takes the topic of Paguyuban Pasundan with the title above, because based on the results of the literature study that the author did, that there are still few works that discuss Paguyuban Pasundan, even though the role of Paguyuban Pasundan as an organization has a major impact on the Indonesian independence movement both nationally and West Java. The author sets out three formulations of the problem in this paper, namely, what is the history of the birth of the Pasundan Community? What is the ideology of Paguyuban Pasundan organization? How were the organizational activities of Paguyuban Pasundan in 1927-1942? The method used is a historical method consisting of four stages, namely: Heuristics, Criticism, Interpretation, Historiography, and is also assisted by using an interdisciplinary approach from the social sciences (especially from Sociology and Politics). The technique that the author uses is a literature study related to the theme that the author is studying. Based on the results of the literature study that the author conducted, that Paguyuban Pasundan was born because of disappointment with Budi Utomo's organization which prioritized the interests of Javanese and Madurese. So, because of these factors, an organization that accommodates Sundanese people was established, namely Paguyuban Pasundan. At the beginning of the establishment of the Paguyuban Pasundan organization moved for the benefit of the Sundanese people but turned into a national interest as evidenced by the period 1927-1942 establishing PPPKI, GAPI and active in the Volksraad. The Pasundan Guyuban movement covers the fields of Politics, Social, Economy, and Education.

Keywords: *Pasundan Association, GAPI, PPPKI*

Abstrak

Penelitian berjudul "PAGOEJOEBAN PASOENDAN 1913-1942". Penulis mengambil topik tentang Paguyuban Pasundan dengan judul di atas, karena berdasarkan hasil studi literatur yang penulis lakukan, bahwa masih sedikit karya yang membahas tentang Paguyuban Pasundan, Padahal peranan Paguyuban Pasundan sebagai sebuah organisasi memberikan dampak yang besar bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia baik lingkup nasional maupun Jawa Barat. Penulis menetapkan tiga rumusan masalah pada tulisan ini yaitu, Bagaimana sejarah lahirnya Paguyuban Pasundan ? Bagaimana ideologi organisasi Paguyuban Pasundan ? Bagaimana kegiatan organisasi Paguyuban Pasundan tahun 1927-1942 ? Metode yang digunakan adalah metode historis yang terdiri dari empat tahapan yaitu : Heuristik, Kritik, Interpretasi, Historiografi, dan dibantu pula dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial (terutama dari Sosiologi dan Politik). Adapun teknik yang penulis gunakan adalah studi literatur yang berhubungan dengan tema yang penulis kaji. Berdasarkan hasil studi literatur yang penulis lakukan, bahwa Paguyuban Pasundan lahir karenaterjadi kekecewaan kepada organisasi Budi Utomo yang lebih mengutamakan kepentingan orang Jawa dan Madura. Sehingga karena faktor tersebut berdirilah organisasi yang mewadahi orang Sunda yaitu Paguyuban Pasundan. Pada awal berdirinya organisasi Paguyuban Pasundan bergerak demi kepentingan orang Sunda namun berubah menjadi kepentingan nasional dibuktikan dengan periode 1927-1942 mendirikan PPPKI, GAPI dan aktif di Volksraad. Pergerakan Paguyuban Pasundan meliputi bidang Politik, Sosial, Ekonomi, dan Pendidikan.

Kata kunci: *Paguyuban Pasundan, GAPI, PPPKI.*

Pendahuluan

Paguyuban Pasundan adalah sebuah organisasi etnis orang-orang Sunda yang lahir di Batavia (sekarang Jakarta) dan berkembang didaerah Jawa Barat serta masih eksistensi hingga saat ini. Paguyuban ini seagai wadah tempat perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) di antara para anggotanya. Eksistensi organisasi Paguyuban Pasundan berbeda nasibnya dengan organisasi lain yang tumbuh dan berkembang bersama Paguyuban Pasundan.

Keberadaan mereka kini telah lama tiada. Selama bertahun-tahun, Paguyuban Pasundan telah memainkan peran yang signifikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Namun, perjuangan pergerakan organisasi Paguyuban Pasundan tersebut tidak terlalu dikenal oleh masyarakat pada umumnya, hal tersebut dibuktikan dengan tidak banyak tulisan yang menjelaskan tentang sikap, tindakan, dan upaya Paguyuban Pasundan dalam masa-masa pergerakan nasional. Padahal peranan organisasi pasundan sangat berdampak sekali bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Tulisan ini mengkaji peran Paguyuban Pasundan dalam periode 1913-1942.

Dikaji berdasarkan fakta sejarahnya, pergerakan organisasi dalam kurun waktu 1913-1942 merupakan periode penting dalam sejarah organisasi pasundan. Fakta tersebut terjadi karena pada periode tersebut organisasi pasundan didirikan yang disebabkan karena kekecewaan kaum terpelajar orang sunda terhadap organisasi Budi Utomo. Budi Utomo yang lebih dulu lahir pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan organisasi pelopor pergerakan nasional di Indonesia (Ricklefs, 2008). Keberadaan organisasi-organisasi masyarakat pribumi pada zaman pemerintah Hindia-Belanda tersebut tidak terlepas dari peranan orang Belanda yaitu Eduard Douwes Dekker.

Beliau merupakan penulis berasal dari Belanda yang menulis tentang praktik penjajahan pemerintah Belanda di Hindia-Belanda. Tulisan tersebut dimuat dalam buku yang berjudul *Max Havelaar*, karena peranan buku tersebut yang sampai kepada kerajaan Belanda, pemerintah kerajaan Belanda melalui gubernur jendral Hindia-Belanda mengeluarkan kebijakan yang bernama politik etis. Kebijakan politik etis ini berdampak kepada kebebasan masyarakat lokal pada saat itu untuk bisa berserikat dan membentuk organisasi, sehingga pada periode tersebut, banyak bermunculan organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Sarekat Islam, dll. Budi Utomo yang merupakan pelopor organisasi pergerakan nasional di dalam awal perjalanannya masih lebih mementingkan etnis tertentu. Hal ini dibuktikan dengan pergerakan dari organisasi tersebut lebih mementingkan kepada orang-orang Jawa dan Madura. Sehingga kaum terpelajar orang sunda mendirikan organisasi yang serupa pergerakannya seperti Budi Utomo yaitu Paguyuban Pasundan yang berdiri pada tahun 1913 di Batavia (Suharto, 2002).

Paguyuban Pasundan (Pagoejoeban Pasoendan) merupakan sebuah organisasi yang berdiri berdasarkan Etnis, bahasa, dan kebudayaan, organisasi Paguyuban Pasundan ini didirikan oleh etnis Sunda yang bermukim di Batavia. Pada perjalanannya organisasi ini mengalami perkembangan yang pesat bahkan pergerakannya tidak hanya dalam bidang pendidikan, melainkan terlibat juga pada bidang sosial dan politik sebelum nantinya dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Hal tersebut membuat penulis tertarik meneliti sejarah Paguyuban Pasundan 1913-1942.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode historis, Terdapat empat tahapan dalam penelitian sejarah sebagai berikut (Notosusanto, 1964):

1. Heuristik adalah proses yang dilakukan oleh seorang sejarawan untuk mengumpulkan informasi sejarah (misalnya catatan masa lalu) yang terkait dengan judul penelitian.
2. Kritik sumber (baik eksternal maupun internal), yaitu upaya yang dilakukan oleh sejarawan untuk menentukan apakah jejak sejarah atau sumber sejarah asli dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam bentuk maupun substansinya.
3. Interpretasi, atau penafsiran, adalah proses yang dilakukan oleh sejarawan untuk menentukan makna berdasarkan konsep dan teori ilmu sosial daripada data yang telah dikumpulkan.
4. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu pekerjaan sejarawan yang menyampaikan sintesa dalam bentuk cerita.

Pada tahapan Heuristik, penulis menggunakan sumber dari karya ilmiah seperti jurnal dan buku koleksi pribadi. Menurut Daliman (2012), "dengan sumber sekunder sudah dapat memahami secara tepat dan mendalam mengenai latar belakang sumber-sumber dan dokumen sezaman, serta telah memperoleh petikan atau kutipan yang lebih lengkap dari sumber-sumber lain atau dokumen sezaman", sehingga penulis tidak menggunakan sumber primer dalam penulisan karya ini.

Karena sumber yang digunakan penulis adalah sumber sekunder, penulis hanya melakukan kritik internal pada tahap kritik. Kritik internal mencoba membandingkan sumber satu dengan sumber lainnya. Penulis membandingkan buku-buku Suharto, *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942*, *Profil Etno Nasionalis*, dan buku Ekadjati, *Kebangkitan Kembali Orang Sunda*, (2004). Dalam buku Suharto (2002) dijelaskan bahwa kekecewaan orang-orang Sunda yang bergabung di organisasi Budi Utomo menyebabkan lahirnya Paguyuban Pasundan. Menurut buku *Kebangkitan Kembali Orang Sunda* oleh Edi S Ekadjati, salah seorang pendiri Paguyuban Pasundan, Diat Hidayat, mengatakan bahwa rasa kepedulian aktivis orang Sunda adalah alasan di balik pendirian Paguyuban Pasundan.

Pada tahap berikutnya adalah interpretasi atau penafsiran, yang berarti menafsirkan informasi yang telah dikumpulkan untuk menjadikannya lebih jelas dan signifikan. Sumber interpretasi adalah buku-buku dan karya ilmiah yang relevan. menggunakan pendekatan interdisipliner: ilmu sejarah digunakan sebagai disiplin ilmu utama untuk menyelidiki masalah dan dibantu oleh ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi dan ilmu politik, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Setelah pengumpulan sumber dan penafsiran sumber, langkah terakhir adalah historiografi. Hasil penelitian disusun menjadi laporan penelitian yang terdiri dari tulisan sejarah yang lengkap.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Lahirnya Paguyuban Pasundan

Orang-orang Sunda masuk ke Budi Utomo setelah lahir pada tanggal 20 Mei 1908 dan terbuka bagi semua orang di Pulau Jawa. Orang Sunda pada waktu itu belum begitu semangat. Meskipun anggota baru organisasi itu menikmatinya, mereka tidak memiliki perspektif masa depan. Tidak ada dari mereka yang memegang jabatan di badan pengurus. Tidak banyak orang

Sunda yang bergabung dengan Budi Utomo di Jakarta. Cabang Budi Utomo didirikan di Bandung, tetapi tidak lama kemudian terbagi menjadi dua: bagian "A" untuk orang Jawa dan bagian "B" untuk orang Sunda, yang dipimpin oleh D.K. Ardiwinata. Cabang Budi Utomo memiliki sekitar 500 anggota pada tahun 1910 (Ali, & Moh, 1972). Pada tahun tersebut, Budi Utomo juga berdiri di Bogor, dengan jumlah keanggotaan sebanyak 150 orang. Namun, setahun kemudian, jumlah anggota menurun drastis, hingga hanya tinggal 25 orang. Orang-orang Sunda yang tidak puas dengan organisasi itu keluar dari Budi Utomo. Mereka berpendapat bahwa hanya orang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memenuhi manfaat dari adanya Budi Utomo.

Paguyuban Pasundan didirikan ketika hanya ada 8 murid Sunda di STOVIA: Mas Dajat Hidajat (lahir 1890), Raden Djoendjoenan Setiakoesoemah (lahir 1892), Asikin (lahir 1891), Moeh Djoehana, Abdoel Patah, Slamet, dan Iskandar. Ada beberapa dari mereka yang menyukai masalah politik, tetapi mereka belum berkumpul. Karena mereka tidak terlalu peduli dengan maksud Budi Utomo, mereka tidak memasukinya. R. Djoendjoenan Setiakoesoemah menjadi perwakilan Indische Partij di STOVIA karena dia lebih tertarik dengan organisasi itu (Ba'in, 1996). Ia juga berpartisipasi dalam pembentukan Sarekat Islam di wilayah Jakarta dan bahkan menjadi pendukungnya. Mereka berkumpul setiap malam Minggu, berbicara dalam bahasa Sunda, tertawa, dan hal-hal lainnya. Mereka segera berkumpul untuk berbagi oleh-oleh setelah kembali dari liburan ke rumah masing-masing. Para siswa sering mengunjungi rumah D.K. Ardiwinata di Gang (sekarang jalan) Paseban, Salemba, Jakarta, yang dianggap sebagai sesepuh mereka. Karena pertemuan-pertemuan ini, cinta mereka terhadap tempat, bahasa, dan budaya mereka meningkat. Pemikiran politik muncul. Mereka merasa lahirnya Budi Utomo sangat penting bagi mereka dan ingin melakukan hal yang sama. Siswa STOVIA dari Sunda percaya bahwa orang Sunda memerlukan organisasi sendiri. Mereka percaya bahwa orang Sunda harus bersatu, terutama mereka yang di luar daerahnya. Mereka percaya bahwa orang Sunda harus bersatu, dan mereka juga harus mempersatukan orang Sunda (Kartini, & Tini, 1979).

Saat tidak ada kelas, Mas Dajat Hidajat mengadakan musyawarah di STOVIA dan memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi untuk orang-orang Sunda. Selain itu, dalam musyawarah itu disebutkan bahwa D.K. Ardiwinata, R. Iskandar Brata, dan R. Emoeng Poerawinata akan menjadi ketua organisasi yang akan didirikan. Akhirnya, mereka sepakat untuk menunjuk D.K. Ardiwinata sebagai ketua, dan R. Djoendjoenan Setiakoesoemah ditunjuk untuk menyampaikan hasil musyawarah itu kepada D.K. Ardiwinata. Selain itu, mereka akan menghubungi teman-teman mereka yang berada di luar STOVIA untuk bergabung dengan Paguyuban Pasundan dan akan membantu usaha itu sepenuhnya. Sejak tahun 1913, para siswa yang berusia sekitar 22 tahun sering berkunjung ke rumah D.K. Ardiwinata di Gang Paseban, Salemba, Jakarta, untuk menyampaikan maksud mereka. Djaka Hidajat adalah siswa yang paling sering berkunjung ke rumahnya. Mereka ingin membangun organisasi untuk orang Sunda seperti yang dilakukan dr. Soetomo dengan mendirikan BUDI UTOMO, dan mereka ingin agar orang tua membimbing mereka. D.K. Ardiwinata menyanggupi permintaan itu (Erawan, & Memed, 1991).

Diadakan pertemuan di rumah D.K. Ardiwinata pada hari Minggu, 20 Juli 1913, setelah dia menyanggupi untuk mendirikan perkumpulan. Rapat tersebut diundang oleh siswa HBS, KWS, dan STOVIA. Oto Soebrata, Loekman Djajadiningrat, Achmad Zoechra, Soetadinata, Ashari, orang tua, dan lainnya hadir. Rapat memutuskan untuk mendirikan organisasi yang disebut "Pasoendan", memilih pengurus, dan menetapkan tujuan sementara. Tujuan organisasi adalah

sebagai berikut: 1. Memajukan bahasa dan budaya Sunda; 2. Memajukan ilmu pengetahuan dari bahasa Belanda; 3. Berpartisipasi aktif dalam pengembangan pengetahuan orang Sunda; dan 4. Tidak berpartisipasi dalam pemerintahan negara (Amin, & Sjarif, 1984). Untuk menjadi anggota, semua orang Sunda yang telah berumur 18 tahun dan siapa saja yang senang dan sayang terhadap orang Sunda dan tanah airnya diterima. Selain itu, rapat memutuskan untuk membuat buletin yang disebut *Papaes Nonoman*. Nama ini diambil dari hadits Nabi Muhammad, yang berarti "perhiasan wanita tertawa, perhiasan laki-laki ilmu."

D.K. Ardiwinata sangat berperan dalam pembentukan Paguyuban Pasundan, selain beberapa siswa yang memiliki ide untuk membentuk organisasi untuk orang Sunda. Pada tahun 1866, Ardiwinata lahir di Bandung. Raja adalah kakek dari Makassar, dan ibunya berasal dari Priangan. Setelah diberikan gelar "kanduruan" (gelar yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada guru yang cakap dan banyak jasanya) pada tahun 1912, ia menggunakan gelar "daeng" (sebagai ciri keturunan bangsawan Makassar) (Irshanto, B. A. 2017). Ia menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 1881 dan masuk sekolah guru bumi putera (kweekschool) di Bandung dalam waktu tiga tahun. Dua tahun kemudian, pada tahun 1886, ia diangkat menjadi guru. Dia pertama kali bekerja di sekolah dasar di Cibadak, kemudian pindah ke Sekolah Kelas I di Karang Pamulangan, sebelum kembali ke OSVIA sebagai guru bahasa Melayu pada tahun 1901. Karena keahliannya sebagai pengarang, dia pindah ke Jakarta pada tahun 1911 dan bekerja di Balai Pustaka sebagai pemimpin redaksi bahasa Sunda sampai 1917. Di sinilah ia menjadi terkenal setelah menjadi pemimpin siswa Sunda di STOVIA dan akhirnya mendirikan Paguyuban Pasundan (Ekadjati, 2004).

Para anggota pengurus Paguyuban Pasundan melakukan propaganda ke Serang, Bogor, Purwakarta, Cirebon, Kuningan, Bandung, Tasikmalaya, dan Cianjur selama libur panjang. Mereka mendapat sambutan hangat di semua tempat yang mereka kunjungi, dan semua orang setuju bahwa Paguyuban Pasundan harus tetap ada. Banyak orang yang menjadi anggota, sehingga total 800 orang menjadi anggota ketika mereka kembali ke Jakarta (Suharto, 2002). Pengurus Paguyuban Pasundan memikirkan untuk meminta izin bergerak dari pemerintah setelah berusia setahun lebih. Pengurus, dengan tanda tangan D.K. Ardiwinata sebagai Ketua dan Iskandar Brata sebagai Sekretaris I, mengajukan permohonan pengesahan kepada pemerintah Hindia Belanda pada 22 September 1914. Pemerintah segera membuat keputusan tidak lama kemudian karena statuten, atau Anggaran Dasar, itu moderat. Paguyuban Pasundan secara resmi diizinkan untuk beroperasi dengan surat keputusan pemerintah No. 46 tanggal 9 Desember 1914.

Menurut Anggaran Dasarnya (pasal 25), Pengurus Besar Paguyuban Pasundan pertama terdiri dari 9 orang, termasuk seorang ketua, seorang wakil ketua, dua orang sekretaris, seorang bendahara, dan empat orang komisar. Lima orang dari pengurus besar berada di Jakarta, dan yang lainnya adalah siswa. Menurut D.K. Ardiwinata, Ahmad Djajadiningrat, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Serang, diangkat sebagai ketua kehormatan, dan C.M. Pleijte, yang saat ini bertugas sebagai Direktur van Onderwijs en Eeredienst, diangkat sebagai pelindung.

Ideologi Organisasi Paguyuban Pasundan

Paguyuban Pasundan melakukan kegiatan politik setelah dibentuk volksraad pada bulan mei 1918 (Utomo, 1995). Empat bagian dari Anggaran Dasarnya diubah, dan diajukan untuk disetujui oleh pemerintah. Paguyuban Pasundan menjadi organisasi yang bekerja di tiga bidang:

politik, ekonomi, dan sosial pada tanggal 13 Juni 1919 dengan Surat Keputusan Pemerintah No. 72 yang mengesahkan pasal-pasal tersebut. Beberapa tahun setelah Paguyuban Pasundan menjadi organisasi politik, ideologi baru, nasionalisme, masuk ke Indonesia melalui para mantan anggota PI yang kembali ke tanah air dan majalahnya, Indonesia Merdeka. Bagi Paguyuban Pasundan, dan organisasi lokal lainnya, ini merupakan angin baru. Teori persatuan nasional, yang merupakan inti dari nasionalisme, berkembang lebih cepat mulai tahun 1924, setelah berdirinya studieclub-studieclub dan kemudian lebih kuat lagi setelah berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno (Sitorus, 1947).

Paguyuban Pasundan dan kelompok serupa lainnya akhirnya menerima ideologi baru. Salah satu buktinya adalah pembentukan komite "Persatuan Indonesia" pada bulan September 1926. Tujuannya adalah untuk menyatukan berbagai ideologi politik dalam pergerakan nasional. Paguyuban Pasundan, bersama dengan Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Budi Utomo, serta beberapa organisasi lokal seperti Persatuan Minahassa (PM), Sarekat Ambon (SA), dan Sarekat Madura, menjadi anggota komite itu. Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr. Sartono, dan Mr. Soejoedi memimpin subkomite di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Akan tetapi komite ini tidak berhasil membentuk suatu badan persatuan, baik federasi maupun non-federal. Deklarasi yang dibuat oleh Paguyuban Pasundan dalam komite tersebut menunjukkan bahwa mereka juga menginginkan persatuan nasional, dan bahwa mereka telah menerima ideologi nasionalisme, khususnya nasionalisme Indonesia. Dengan menerima ideologi baru ini, Paguyuban Pasundan mengubah sifatnya dari kelompok etnis menjadi kelompok etnonasionalis.

Tahun 1927, Ir. Soekarno membuat gagasan untuk menyatukan semua partai politik dalam satu wadah. Dalam upaya terakhir untuk membentuk PNI, yang dimulai pada bulan Juni 1927, ia memperluas proposal yang telah dibuat sebelumnya dan menuntut pembentukan federasi partai politik Indonesia. Dia percaya bahwa federasi yang akan dibentuk hanya akan mencerminkan keadaan sosial dan politik Indonesia yang terdiri dari berbagai aliran organisasi. Akibatnya, dia percaya bahwa badan federasi itu harus memiliki struktur yang longgar tetapi sekaligus berfungsi sebagai "*front* sawo matang" yang ketat melawan Belanda (Lubis, & Nina, 2003). Anggaran Dasar Federasi yang dirancang oleh Soekarno bekerja sama dengan dr. Soekiman (SI) dibagikan kepada peserta kongres SI di Pekalongan pada September 1927 untuk dibahas. Anggaran Dasar menyatakan bahwa badan federasi yang akan dibentuk tidak akan membawahi partai politik yang ada. Mereka akan bergerak secara bebas dan hanya akan melakukan kegiatan dalam bidang yang telah disetujui bersama. Semua keputusan akan dibuat secara mufakat.

Soekarno menjelaskan secara rinci tiga pasal utama dari rancangan anggaran dasar federasi yang diusulkan pada pidatonya di kongres itu. Ia menegaskan bahwa pasal-pasal tersebut tetap memberikan kebebasan kepada setiap organisasi anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan apa pun, dan bahwa pasal-pasal tersebut sepenuhnya mempertimbangkan berbagai bentuk gerakan nasionalis yang ada. Semua anggota partai yang ada harus setuju untuk menerima anggota baru. Kongres menyetujui proposal PNI dan SI untuk bergabung dengan badan federasi yang dimaksud. Selain itu, Kongres memberikan kepercayaan kepada Soekarno untuk membuatnya secara menyeluruh. Soekarno segera melakukan tindakan; dalam beberapa minggu, berbagai partai politik, termasuk Paguyuban Pasundan, menerima undangan untuk membentuk badan federasi. Sebelum rapat, rancangan anggaran

dasar federasi dikirim kepada semua pengurus besar partai.

Delapan organisasi menghadiri rapat pembentukan badan federasi di Bandung pada 17-18 Desember 1927. R. Oto Koesoema Soebrata, Bakri Soerjatmadja, dan Sutisna Sendjaja mewakili Paguyuban Pasundan dalam pertemuan tersebut. Dalam rapat itu, Permusyawaratan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI atau P3KI) didirikan, dan rancangan Anggaran Dasar Federasi yang dirancang oleh Ir. Soekarno dan dr. Soekiman diterima (Mulyana, 1999). Organisasi di dalam federasi berusaha untuk menyamakan tindakan di seluruh negeri dengan memperkuat organisasi dan mendorong kerja sama. Dengan demikian, diputuskan bahwa federasi ini tidak akan mencapai kesepakatan mengenai asas karena keyakinan partai-partai yang tergabung berbeda. Keputusan yang dibuat hanya dengan suara bulat akan mengikat semua anggota. Namun, jika tidak ada kesepakatan, keputusan hanya dibuat oleh partai yang menyetujuinya. Selain itu, suatu Majelis Pertimbangan dibentuk sebagai alat tetap federasi, yang terdiri dari wakil dari partai-partai anggota, seorang ketua, dan seorang sekretaris dan bendahara. Kedua orang yang disebut permulaan memegang jabatan Pengurus Harian, tetapi mereka tidak memiliki hak suara.

Setelah berpartisipasi dalam rapat pembentukan badan federasi itu, Paguyuban Pasundan menjadi anggota. Fokusnya meningkat pada masalah politik, sehingga orang-orang umumnya melihat masuknya perkumpulan itu ke dalam PPPKI sebagai langkah yang masuk akal. Hampir lima bulan setelah PPPKI didirikan, pada 20 Mei 1928, cabang Paguyuban Pasundan berkumpul di Jakarta untuk membahas masalah jumlah anggota yang berkurang. Propaganda nasionalis PNI menyebabkan anggota Paguyuban Pasundan meninggalkan perkumpulan itu. Nasionalisme Indonesia membutuhkan rasa kedaerahan di mana pun. Dalam pertemuan itu, Paguyuban Pasundan menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada bangsa yang abadi dan bahwa semua orang harus berusaha menuju cita-cita bangsa. Paguyuban Pasundan berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya memajukan rakyat. Setuju, Paguyuban Pasundan melihat kemajuan menuju persatuan dan cinta tanah air Indonesia. Oleh karena itu, Paguyuban Pasundan bergabung dengan badan federasi dengan harapan keadaan akan menjadi lebih baik dengan PPPKI. Keputusan yang dibuat dalam rapat tersebut adalah untuk berusaha mempertahankan anggota Sunda dalam Paguyuban Pasundan (Amin & Sjarif, 1984).

Paguyuban Pasundan, dipimpin oleh R. Oto Koesoema Soebrata, putra seorang bekas Bupati Ciamis dan anggota *Volksraad*, beroperasi dengan tenang di berbagai bidang sosial selama tahun 1928. Pengurus Besar bekerja sama dengan pemerintah, pejabat pemerintah, dan dewan kabupaten, masing-masing dengan wakil. Dalam kongres Paguyuban Pasundan yang diadakan di Tasikmalaya pada 30 Maret hingga 1 April 1929, pendirian perkumpulan itu menjadi lebih tegas. R. Oto Koesoema Soebrata, ketuanya, menyatakan bahwa orang Sunda hanyalah sebagian dari Indonesia. Dalam hal Paguyuban Pasundan berusaha memajukan wilayah Pasundan dalam hal sosial, ekonomi, dan kebudayaan, jangan diartikan seakanakan Pasundan memisahkan atau mengasingkan diri dari golongan rakyat yang lain (Suharto, 2002). Menurut tutur ketua, Bahasa Indonesia dan Bahasa Belanda digunakan sebagai jembatan (alat komunikasi) dengan kelompok masyarakat yang berbeda.

Paguyuban Pasundan juga percaya pada persatuan Indonesia, jadi mereka bekerja sama dengan organisasi lain dalam PPPKI untuk kepentingan Indonesia, tetapi mereka akan mengutamakan aktivitasnya di wilayah Sunda sebagai bagian dari nusa dan bangsa Indonesia. Perkumpulan, bekerja sama dengan pemerintah, akan mencapainya dengan cara yang damai.

Sebagian anggotanya kemudian merasa tidak puas dengan kerukunan PPPKI. PSII keluar karena pertengkaran anggotanya, dan PNI membangun federasi pada tahun 1930, tetapi tidak aktif karena penangkapan tokoh-tokohnya, termasuk Ir. Soekarno, dan pada tahun 1931 partai itu dibubarkan (Ramelan, 1983). Di bawah kondisi PPPKI ini, partai-partai Indonesia lainnya semakin tertarik untuk bekerja sama dalam bentuk fusi, yang dianggap lebih stabil daripada federasi. Rencana fusi itu pada dasarnya disetujui dalam kongres Budi Utomo di Jakarta (3-4 April 1931). Perkumpulan bersedia untuk dibubarkan karena itu. Paguyuban Pasundan memperhatikan pergeseran fokus dari federasi ke fusi. Dalam kongres ke-16 yang diadakan di Budi Utomo antara 4 dan 5 April 1931, perkumpulan itu dengan sengaja mengundang dua tokoh: Mr. Sartono dari PNI untuk berbicara tentang uni dan Dr. Sam Ratoelangi dari Persatoean Minahassa untuk berbicara tentang federasi. Kedua hal itu diuraikan oleh Paguyuban Pasundan dengan tujuan untuk benar-benar memahaminya, kemudian menilai dan memilih cara terbaik untuk mencapai tujuan nasional, yaitu Indonesia merdeka.

Pada rapat terbuka tanggal 5 April 1931 dan kemudian rapat tertutup, kongres mengeluarkan resolusi bahwa Paguyuban Pasundan akan memperkuat dan memperbaiki front persatuan partai-partai politik dalam bentuk federasi, khususnya PPPKI. Dalam hal bentuk fusi yang diinginkan Budi Utomo, perkumpulan itu berpendapat bahwa fusi partai-partai politik kebangsaan harus segera dilakukan. Sejak tahun 1931, ketika perkumpulan dipimpin oleh R. Oto Iskandar di Nata, fokusnya menjadi lebih pada politik, berjuang untuk posisi di Dewan Kabupaten, Dewan Propinsi, dan *Volksraad* (Lubis & Herlina, 2012). Perkumpulan memperhatikan banyak hal, terutama sifat kedaerahan yang dibutuhkan oleh nasionalisme Indonesia. Paguyuban Pasundan menjadi partai politik berdasarkan nasionalisme dan terbuka menyatakan simpatinya terhadap kelompok radikal seperti Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru). Mereka berjuang untuk mendapatkan Indonesia merdeka dan mencapai tujuan federasi Indonesia.

Sementara Oto Iskandar di Nata memimpin Paguyuban Pasundan, rencana fusi yang diusulkan oleh Budi Utomo dari tahun 1934 hingga 1935 masih dalam proses. Pada akhirnya, berkat upaya Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), keduanya melebur pada akhir Desember 1935, membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra). Selama pertemuan peleburan di Solo, Sarekat Sumatera, Tirtayasa, dan Sarekat Celebes juga melebur pada awal tahun 1936. Partai baru itu memiliki banyak pemimpin terkenal, seperti Moh. Husni Thamrin, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, dan Mr. Soenarjo. Anggaran Dasar Parindra menyatakan bahwa mereka berusaha untuk mencapai "Indonesia yang besar dan luhur" dengan memperkuat nasionalisme Indonesia, melakukan tindakan politik sampai terbentuk sistem pemerintahan yang didasarkan pada nasionalisme dan demokrasi, dan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi rakyat (Dimiyati & Muhammad, 1950).

Pada kongres ke-21 yang diadakan di Bandung pada awal April 1936, Paguyuban Pasundan menyatakan melalui telegram bahwa mereka tidak akan hadir dalam rapat fusi. Pasundan mengikuti keputusan kongres tahun 1931 untuk tidak menyetujui fusi tetapi menyetujui federasi. Dalam kongres ke-21, yang dihadiri oleh 34 cabang dari 52 cabang perkumpulan, Pasundan Istri (Pasi), yang memiliki 24 cabang, belum memutuskan untuk meleburkan diri dalam Parindra (Nitisastro, & Widjojo, 1970). Pasundan tidak yakin apakah meleburkan diri akan bermanfaat atau tidak. Keputusan kongres yang dibuat oleh sebagian pergerakan menimbulkan pertanyaan tentang motivasi pergerakan itu. Harian Tjaja Timoer

mencari dasar hukum yang dalam untuk menjawab pertanyaan itu. Menurut diskusi yang dilakukan redaksi harian itu dengan para pemimpin Paguyuban Pasundan sebelum dan sesudah kongres, sikap yang diambil itu sangat bermanfaat bagi bangsa dan tanah air Indonesia, terutama bagi daerah dan penduduk Pasundan. Harian ini dan sejumlah pemimpin Pasundan menyatakan bahwa perbedaan antara kelompok terletak pada tujuan utamanya. Bagi Partindo, Budi Utomo, dan PBI, tujuan utamanya adalah politik. Sebaliknya, bagi Paguyuban Pasundan, politik adalah alat untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, sosial, dan lainnya. Dengan memiliki banyak sekolah, mudah untuk memahami bahwa perkumpulan ini berusaha untuk memastikan bahwa usaha mereka tidak terhalang.

Paguyuban Pasundan siap bekerja sama demi kepentingan bangsa dan tanah air. Harian ini menganggap peleburan Budi Utomo dan PBI sebagai bagian dari pergerakan politik Indonesia, dan sikap Paguyuban Pasundan juga dianggap benar. Soeara Katholiek juga menyatakan bahwa dia dapat memahami keputusan itu karena semangat persatuan pada saat itu belum kuat, dan masih banyak orang yang belum memahami benar manfaat persatuan Indonesia. Dikatakan bahwa semangat persatuan tidak muncul secara kebetulan, tetapi tumbuh seiring waktu. Surat kabar itu mempertanyakan mengapa Paguyuban Pasundan, yang memiliki dasar dan tujuan yang sama dengan Parindra, tidak mau bergabung dengannya (Sitorus, 1947).

Mereka lebih memilih untuk tetap berdiri sendiri, sehingga mereka dapat lebih fokus pada nasib rakyat dan Tanah Pasundan. Disebutkan bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa individu mengambil tindakan nyata dalam upaya mereka untuk mencapai prinsip persatuan. Orang biasanya lebih memperhatikan hal-hal yang dekat dengan mereka daripada hal-hal yang jauh dari mereka. Menurutnya, lebih baik ada partai Pasundan dengan banyak anggota yang ingin bekerja untuk kepentingan rakyat dan Tanah Pasundan tidak membawa bahaya atau kerugian kepada Indonesia seluruhnya daripada tidak ada perkumpulan itu sehingga hanya sedikit orang dari Tanah Pasundan yang mau berpartisipasi dalam perkumpulan politik untuk memperhatikan nasib daerah mereka sendiri dan seluruh Indonesia.

Tidak lama setelah Soeara Katholiek menyatakan pendapatnya, majalah Sipatahoenan pada 10 Juni 1936 menerbitkan tulisan seseorang dengan nama samaran "B.S." yang membahas salah satu alasan mengapa Paguyuban Pasundan tidak ingin bergabung dengan Parindra. Dilaporkan bahwa Pasoendan tidak ingin melebur karena perkumpulan itu takut bahwa fusi itu tidak akan bertahan lama dan akan memiliki konsekuensi yang tidak diketahui secara menyeluruh (Ramelan, 1983). Mereka mengatakan bahwa mereka yang melebur akan kehilangan atau rugi jika terjadi kekacauan. Organisasi sosial yang didirikan oleh kelompok itu akan runtuh. Pasundan berpendapat bahwa fusi partai politik belum saatnya. Federasi cukup untuk mendapatkan kerja sama yang sesuai dari berbagai partai. Perihal sikap Paguyuban Pasundan. Ada yang tidak setuju, dan beberapa bahkan menuduh perkumpulan itu provinsialistis. Pasundan menolak tuduhan itu karena organisasi itu mendukung persatuan antara semua bangsa Indonesia. Menurut pemimpinnya, persatuan dapat unitaristis atau federalistis. Persekutuan menginginkan persatuan dan membutuhkannya, hanya melalui federasi. Itu adalah semangat Pasundan untuk membangun persatuan Indonesia.

PPPKI menjadi lebih lemah setelah beberapa anggota melebur ke Parindra pada akhir tahun 1935. Paguyuban Pasundan, bersama dua organisasi lainnya, telah kehilangan informasi tentang PPPKI, dan badan federasi itu hanya simbol saja. Pada akhir Maret 1938, atas inisiatif PSII, Pasoendan menghadiri konferensi di Bandung (Lubis, & Herlina, 2012). Konferensi

tersebut dihadiri oleh PSII, Parindra, dan Gerakan Rakjat (Gerindo) untuk membentuk badan kerja sama politik untuk menuju kongres Indonesia Raya. Pada prinsipnya semua setuju, dan rapat memberi PSII tugas untuk menyusun rencananya. Pada tanggal 4 Mei 1938, rapat pembentukan badan kerja sama itu diadakan, dan Badan Perantaraan Partai-partai Politik Indonesia (Bapeppi) didirikan. Dengan PSII sebagai satu-satunya partai yang sepenuhnya masuk, Paguyuban Pasundan tidak memperhatikan badan federasi itu, sehingga keberadaan Bapeppi tidak penting.

Pada tahun 1939, inisiatif Parindra memicu keinginan untuk membentuk badan federasi. Untuk menyampaikan maksud itu, Oto Iskandar di Nata dan pemimpin partai lainnya didekati. Dalam kongresnya yang ke-24 pada bulan April 1939, Paguyuban Pasundan setuju bahwa setiap upaya para pemimpin untuk mencapai tujuannya harus didasarkan pada sikap saling menghargai dan bahwa upaya itu harus lebih dari sekedar demonstrasi. Dalam kongres itu, Oto Iskandar di Nata mendesak Belanda untuk mengubah sikapnya terhadap jajahan-jajahannya karena bahaya internasional. Setelah Moh. Husni Thamrin dihubungi, partai-partai lain akhirnya menyatakan persetujuannya. Atik Soeari, S. Soeradiredja, dan Ir. Oekar Bratakoesoemah dari Paguyuban Pasundan menghadiri pertemuan untuk membentuk badan federasi baru di Jakarta pada 21 Mei 1939. Dengan suara bulat, rencana yang diusulkan oleh Moh. Husni Thamrin disetujui. Badan federasi ini disebut sebagai Gabungan Politik Indonesia (Gapi). Sampai Pemerintah Hindia Belanda berakhir pada tahun 1942, Paguyuban Pasundan menjadi anggota. Adanya Paguyuban Pasundan dalam Bapeppi dan kemudian Gapi karena keduanya merupakan federasi, yang berarti partai politik bekerja sama untuk mencapai cita-cita bersama. Dengan kata lain, Paguyuban Pasundan yang menjadi anggota federasi tetap dapat melaksanakan cita-citanya (Suharto, 2002).

Kegiatan Organisasi Paguyuban Pasundan Tahun 1927-1942

Kegiatan suatu kelompok (dalam hal ini Paguyuban Pasundan) dapat menunjukkan keberadaannya selama suatu periode pergerakan nasional. Sejak tahun 1927, ketika perkumpulan itu menjadi anggota badan federasi PPPKI, hingga tahun 1942, ketika perkumpulan itu dibubarkan oleh Jepang, bersama dengan perkumpulan politik lainnya. Diharapkan bahwa penjelasan tentang kegiatan perkumpulan itu, terutama dari tahun 1927 hingga 1935, akan memberikan alasan mengapa mereka tidak ingin bergabung dengan Parindra. Untuk memasukkan Paguyuban Pasundan ke dalam kategori gerakan nasional, aktivitasnya harus dijelaskan sampai tahun 1942. R. Oto Koesoemah Soebrata dan R. Oto Iskandar di Nata memimpin Paguyuban Pasundan selama hampir 15 tahun itu, dan perkumpulan mengalami kemajuan pesat sejak dipimpin oleh Oto Iskandar di Nata. Paguyuban Pasundan, yang didirikan pada tahun 1931, bekerja sampai tahun 1942 (Ramelan, 1983).

Selama perjalanannya, Paguyuban Pasundan melakukan aktivitasnya di bidang politik. Di tingkat lokal (Dewan Kotapraja, Dewan Kabupaten, dan Dewan Propinsi), serta di tingkat nasional (*Volksraad*) dan di luar dewan, operasi ini dilakukan. Dalam pidato pembukaan kongresnya di Cirebon tahun 1937, R. Oto Iskandar di Nata menjelaskan mengapa Paguyuban Pasundan memilih politik perjuangan karena dianggap sebagai senjata yang sangat ampuh jika orang yang menggunakannya memiliki tiga syarat: kekuatan batin dan mental, kekuatan uang, dan solidaritas (Falah, 2010). Menurutnya, syarat-syarat itu tidak ada di kalangan orang Indonesia pada saat itu, sehingga politik tidak berguna dalam pelaksanaannya, bahkan dapat

mengacaukan pergerakan.

Perkumpulan menetapkan aturan yang harus diikuti oleh anggota dewan. Terhadap wakilnya di *Volksraad*, mereka harus mempertahankan prinsip "Indonesia Mulia" di lembaga tersebut dan menyampaikan amanah partainya tentang berbagai masalah yang telah dibahas secara menyeluruh. Selain itu, karena jumlah wakilnya yang semakin meningkat dalam dewan-dewan lokal, diperlukan pedoman. Dalam hal ini, Pengurus Besar dan wakil-wakilnya dalam dewan-dewan lokal berkumpul beberapa kali. Bagaimana sikap wakil-wakil itu, apakah mereka harus melakukan oposisi atau sebaliknya, berpartisipasi dalam lembaga pemerintah, adalah masalah yang sangat diperhatikan selama konferensi itu. Akhirnya, konferensi memutuskan bahwa anggota Paguyuban Pasundan akan berpartisipasi dalam badan pemerintah, tetapi mereka harus mengikuti prinsip "bekerja untuk kepentingan umum dengan pikiran tenang dan maksud suci." Dalam dewan lokal, diharapkan untuk membentuk fraksi nasional karena wakil-wakil dari partai lain berhadapan untuk tidak merusak atau merendahkan partainya. Wakil Paguyuban Pasundan harus bergabung dengan wakil dari partai lain.

Sejak didirikan *Volksraad*, perkumpulan ingin mempunyai wakil di dalamnya pada tingkat nasional. Selama periode pertama (1918-1921), karena belum ada kandidat untuk jabatan itu, calon anggota yang dekat dengannya dibantu. Hal ini juga berlaku untuk periode kedua (1921-1924), ketiga (1924-1927), dan keempat (1927-1931). Dengan demikian, Paguyuban Pasundan memiliki wakil dan R. Oto Koesoema Soebrata adalah anggota yang didukung dari tahun 1927 hingga 1931. Meskipun demikian, ia meletakkan jabatannya karena masalah kesehatan dan digantikan oleh Idih Prawiradipoetra. R. Oto Iskandar di Nata adalah wakil Paguyuban Pasundan untuk periode berikutnya. Dia menjabat selama tiga periode, hingga tahun 1942. Sejak tahun 1927–1942, Paguyuban Pasundan selalu terlibat dalam peristiwa nasional. Perkumpulan itu ikut serta dalam pembentukan PPPKI di Bandung pada tahun 1927 (Suhardi, 2004). R. Oto Koesoema Soebrata (sebagai Ketua Pengurus Besar pada saat itu), Bakrie Soeraatmadja, dan Soetisna Sendjaja mewakili Paguyuban Pasundan dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh wakil dari PNI, BO, Parsas, Serikat Soematera, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub, dan Paguyuban Pasundan, badan federasi itu berhasil didirikan. Anggota badan federasi itu adalah Paguyuban Pasundan dan kelompok lain.

Tahun 1932, ada masalah di bidang pendidikan karena pemerintah kolonial mengeluarkan *Wilde Scholen Ordonantie* (WSO). Ordonansi ini dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 1932 dalam upaya untuk menghentikan sekolah swasta di Indonesia. Kaum pergerakan menentang keras ordonansi itu. Ki Hadjar Dewantara, pendiri dan pemimpin Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922, memulai inisiatif perlawanan, yang mendapat sambutan baik dari kaum pergerakan. Dalam hal ini, Paguyuban Pasundan cabang Palembang menentang undang-undang tersebut. Selanjutnya, kongres Paguyuban Pasundan memutuskan untuk menentang undang-undang tersebut dan akan menarik wakilnya dari dewan jika undang-undang tersebut tidak diubah. Hampir empat tahun kemudian, perhatian kaum pergerakan tertuju pada proposal Soetardjo Kartohadikoesoemo—juga dikenal sebagai petisi Soetardjo—setelah gerakan nasional terfokus pada WSO (Suharto, 2002). Petisi itu diserahkan ke *Volksraad* pada 15 Juli 1936. Dalam menanggapi petisi itu, ada tiga kelompok anggota Fraksi Nasional: sebagian menolak, sebagian menyetujui, dan sebagian lagi setuju dengan syarat. Oto Iskandar di Nata, anggota fraksi tersebut, termasuk dalam kelompok terakhir. Petisi itu akhirnya disetujui setelah diskusi, dengan 26 suara setuju dan 20 menolak. Petisi itu juga

dikirim ke pemerintah Belanda.

Paguyuban Pasundan menyangkan sikap Menteri Colijn dalam Staten Generaal mengenai petisi ini, yang menyatakan bahwa menambah otonomi Indonesia tidak diperlukan. *Centraal Comitte Petitie Soetardjo* (CCPS) dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1937 untuk mengumpulkan tanda tangan untuk menggolkan petisi. Oto Iskandar di Nata dan Atik Soeardi mewakili Paguyuban Pasundan dalam komite. Dalam kongresnya di Sukabumi pada bulan April 1938, Paguyuban Pasundan memutuskan untuk menyokong petisi itu. Oto Iskandar di Nata menjelaskan alasan dia menyokong petisi di kongres. Dijelaskan bahwa jika petisi diterima, rakyat akan memiliki banyak kesempatan untuk menyampaikan keinginan mereka, dan pemerintah dan pihak Indonesia tidak akan mencurigai satu sama lain.

Ada upaya untuk membentuk konsentrasi di seluruh negeri, menurut Kongres Paguyuban Pasundan di Cianjur pada bulan April 1939. Kongres kemudian memutuskan bahwa organisasi menyetujui setiap upaya untuk meningkatkan kekuatan bangsa untuk meningkatkan derajatnya asli didasarkan pada hal-hal berikut: 1. usaha itu harus dilakukan dengan semangat suci; 2. usaha itu harus benar-benar didasarkan pada saling hormat-menghormati; 3. usaha itu harus dilakukan dari atas ke bawah; dan 4. usaha itu tidak boleh dilakukan hanya sebagai demonstrasi. Kongres memutuskan untuk memberi mandat sepenuhnya kepada Pengurus Besar untuk berpartisipasi dalam membangun konsentrasi nasional dengan mempertimbangkan hal-hal di atas. Oto Iskandar di Nata mendesak dalam kongresitu agar Nederland mengubah sikapnya terhadap jajahan-jajahan karena ancaman internasional.

Kegiatan yang dilakukan Paguyuban Pasundan di bidang politik dilakukan dalam dewan-dewan, baik di tingkat lokal (dewan kotapraja, Dewan Kabupaten dan Dewan Propinsi) maupun di tingkat nasional (*Volksraad*) dan di-luar dewan-dewan. Sejak tahun 1931 dibawah pimpinan Otto Iskandar Di Nata perhatian Paguyuban Pasundan dipusatkan pada bidang politik yaitu berjuang untuk memperoleh kursi di dewan kabupaten dan dewan propinsi. Bagi paguyuban pasundan pergerakan politik ini digunakan sebagai alat untuk mencapai perbaikan di bidang ekonomi, sosial dan bidang lainnya (Lubis, & Nina, 2003).

Pada kegiatan ekonomi paguyuban Pasundan terbagi dalam dua kegiatan yaitu Perbankan dan Koperasi. Bank *Central* Pasundan dibentuk pada kongres ke-19 yang berlangsung pada 30 Maret 1934 sampai dengan 1 April 1934, muncul gagasan untuk membentuk suatu pimpinan pusat yang akan mengumpulkan modal guna meningkatkan semangat berusaha. Dari gagasan tersebut dibentuklah sebuah Bank di tingkat Pusat yaitu Bank *Central* Pasundan dengan modal berupa saham seberal F 50.000,- yang setiap lembar sahamnya mempunyai nilai nominal f 10,- Tujuan didirikannya Bank *Central* Pasundan ini untuk mengelola keuangan Paguyuban Pasundan baik itu dari pemasukan pendidikan, mengelola pinjaman dan mengelola kegiatan perbankan lainnya. Bank *Central* Pasundan ini pada awalnya bertempat di Batavia sama dengan secretariat pusat Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, namun ikut pindah ketika sekretariat Paguyuban Pasundan pindah Ke Bandung.

Kegiatan ekonomi Paguyuban Pasundan yang lain yaitu kegiatan Koperasi. Pada Masa Kepemimpinan Oto ada juga kegiatan berwirausaha, koperasi ini dikelola oleh cabang-cabang pasundan. Hampir setiap cabang Organisasi Paguyuban Pasundan mempunyai Koperasi yang didirikan untuk memberikan bantuan keuangan bagi anggota yang memerlukan dan tabungan bagi para anggota Paguyuban Pasundan. Selain itu kegiatan Koperasi Paguyuban Pasundan yaitu menyediakan alat-alat pertanian dan kebutuhan petani lainnya. Maka dari itu di beberapa

cabang Paguyuban Pasundan Koperasi ini disebut Koperasi Paguyuban Tani.

Paguyuban Pasundan juga melakukan kegiatannya pada bidang pendidikan dibuktikan dengan pada masa kepemimpinan Oto Iskandar Di Nata organisasi Paguyuban Pasundan mendirikan sekolah yang bernama sekolah Pasundan yang berdiri di berbagai daerah, karena menurut Oto bahwa satu-satunya jalan untuk melawan penjajah adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan. Tahun 1931 diadakan kongres di Bogor, hasil kongres tersebut yaitu:

1. Mendirikan *Studiefonds* (Beasiswa) Pasundan yang telah direncanakan sejak 10 Tahun kebelakang.
2. Mendirikan Bale Pamoelangan Pasundan (BPP) yaitu badan yang mempunyai tugas mengkoordinir, membina dan mengawasi sekolah-sekolah Pasundan yang saat itu telah menyebar hampir ke seluruh Indonesia.

Berdasarkan hasil kongres tersebut maka Pada Masa kepemimpinan Oto di Paguyuban Pasundan dalam bidang pendidikan ini didirikan Bale Pamulangan Pasundan yang mempunyai tugas untuk mengurus sekolah-sekolah pasundan yang terbagi di berbagai wilayah Pasundan. Sekolah Paguyuban Pasundan Pertama didirikan yaitu HIS bersubsidi di Tasikmalaya dan MULO yang juga didirikan di Tasikmalaya, sekolah ini didirikan tahun 1930. Kemudian Tahun 1935 Organisasi Paguyuban Pasundan telah mempunyai 29 sekolah dengan jumlah guru 112 dan 3000 orang siswa (Suharto, 2002). Hingga saat ini ada beberapa sekolah-sekolah Pasundan yang masih berdiri bahkan Organisasi Paguyuban Pasundan berhasil mendirikan Perguruan Tinggi yaitu Universitas Pasundan. Organisasi Paguyuban Pasundan merupakan Organisasi yang masih bertahan dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Bagi Organisasi. Paguyuban Pasundan Pendidikan merupakan salah satu cara yang mampu mengangkat dan memperbaiki nasib rakyat dari kemiskinan dan keterbelakangan.

Kesimpulan

Sejarah Paguyuban Pasundan antara tahun 1913-1942. Organisasi ini lahir karena terjadi kekecewaan kepada organisasi Budi Utomo yang lebih mengutamakan kepentingan orang Jawa dan Madura. Sehingga karena faktor tersebut berdirilah organisasi yang mewadahi orang Sunda yaitu Paguyuban Pasundan. Pada awal berdirinya organisasi Paguyuban Pasundan bergerak demi kepentingan orang Sunda namun ketika angin Nasionalisme masuk ke Indonesia yang tentunya merubah cara pandang Paguyuban Pasundan tentang perjuangan, Ideologi Nasionalisme muncul dan mulai menyebar di Indonesia kemudian berdiri Partai Nasional Indonesia di bawah Pimpinan Ir. Soekarno. Ideologi baru itu diterima oleh Paguyuban Pasundan dan beberapa perkumpulan serupa lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya suatu komite "Persatuan Indonesia" yang bertujuan untuk mempersatukan berbagai kelompok politik di kalangan pergerakan nasional, Paguyuban Pasundan masuk menjadi anggota komite tersebut bersama dengan perkumpulan lainnya seperti Muhammadiyah, JIB, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Ikut sertanya Paguyuban Pasundan dalam komite tersebut menunjukkan bahwa perkumpulan itu menghendaki juga adanya persatuan nasional dan hal itu berarti paguyuban pasundan telah menerima ideologi nasionalisme (nasionalisme Indonesia), dengan diterimanya ideologi nasionalisme itu, maka Paguyuban Pasundan berubah sifat perkumpulannya dari perkumpulan etnis menjadi perkumpulan nasionalis.

Pada tahun 1927 dan tahun 1931 merupakan tahun-tahun penting. Tahun 1927 mulai

beralihnya pergerakan paguyuban pasundan dari perkumpulan etnis menjadi nasionalis yang ditanyai dengan bergabungnya Paguyuban Pasundan dengan PPPKI, yang pada awalnya hanya mementingkan kepentingan daerah yaitu sunda menjadi perkumpulan nasional yang mempunyai tujuan nasional yaitu kemerdekaan bangsa. Walaupun pada akhirnya Paguyuban Pasundan tetap menjadi perkumpulan etno-nasionalis yaitu perkumpulan nasiona yang bekerja untuk suatu daerah yaitu jawa barat tetapi peranannya sangat bermanfaat untuk masyarakat luas tidak hanya orang Sunda. Adapun aktifitas dari organisasi paguyuban pasundan meliputi beberapa bidang yaitu bidang politik, ekonomi dan sosial, dan bidang pendidikan.

Referensi

- Ali, M. (1972). *Sedjarah Jawa Barat. Suatu Tanggapan*. Bandung: Pemda Jawa Barat.
- Amin, S. (1984). *Perjuangan Paguyuban Pasundan, 1941-1942*. Bandung: Sumur Bandung.
- Andre, B.I. (2017). "Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959." *DIAKRONIKA* 17(1), 76-89.
- Ba'in. (1996). "Terbentuk dan Runtuhnya Negara RIS 1945-1950." Program Studi Ilmu Sejarah Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dimiyati, dan Muhammad. 1950. *Sedjarah Perdjuaan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Edi, S. (2004). *Fatimah In West Java Moral Admonitions to Sundanese Gentlewomen*. Bandung: Pusat Studi Sunda.
- Ekadjati. (2004). *Paguyuban Pasundan Sebuah Kebangkitan Kembali Orang Sunda 1913-1918*. Bandung: Ar-Ruzz.
- Erawan, dan Memed. (1991). *Paguyuban Pasundan Di Tengah-Tengah Kancah Perjuangan Bangsa*. Bandung: Mandalawangi.
- Falah. (2010). *Sejarah Kota Tasikmalaya 1820-1942*. Tasikmalaya: Pemkab Tasikmalaya.
- Kartini, dan Tini. (1979). *Daeng Kanduruan Ardiwinata Sastrawan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Lubis, dan Nina, H. (2003). *Sejarah Tatar Sunda, Jilid 2*. Bandung: Satya Historika.
- _____. (2012). *Sejarah Kabupaten Karawang*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyana, A. (1999). *Pergumulan Elite Sunda Pada Massa Revolusi: Kasus Berdiri Dan Bubarnya Negara Pasundan 1947-1950. Dalam Sri Sutjiatiningsih (Ed.), Kongres Nasional Sejarah 1996 Subtema: PEMIKIRAN DAN ANALISIS TEKS SEJARAH II*. Jakarta: CV Ilham Bangun Karya.
- Nitisastro, dan Widjojo. (1970). *Population Trends in Indonesia*. New York: Cornell University Press.
- Notosusanto, N. (1964). *Hakekat Sejarah Dan Azas-Azas Metode Sejarah*. Bandung: ISBA.

- Ramelan, H. (1983). "Sejarah Pagoejoeban Pasoendan (1914-1982)." Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: penerbit Serambi.
- Sitorus, L.M. (1947). *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta.
- Suharto. (2002). *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942 (Profil Pergerakan Etno - Nasionalis)*. Bandung: Satya Historika.
- Utomo, B. (1995). *Dinamika Pergerakan Kebangsaan Indonesia Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan*. Semarang: Ikip Semarang Press.